

DAFTAR PUSTAKA

- Tahir, S. (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. *DEMOKRASI*, 2(2).
- Rusdy, R. I. R., & Flambonita, S. (2023). PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Lex LATA*, 5(2).
- Saija, V. J. (2014). Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sasi*, 20(2), 1-13.
- Aziz, M. (2010). Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 113-150.
- T. (2018). Teori dan Konsep Etika Administrasi Publik. Warjiyati,
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persaa-Rajawali Pers.
- Setyobudi, Y. F. (2013). Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Jurnal Dimensi*, 2(1).

- Nuriyanto, N. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 428-453.
- Pangkey, I., & Rantung, M. I. R. (2023). Manajemen Pelayanan Publik. *Penerbit Tahta Media*.
- Rizma, K. S. (2024). *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Adiatma, T., Harahap, T. K., Hendrayady, A., Anto, R. P., Mariam, I., Ainurrahmah, Y., & Tui, F. P. (2023). Manajemen Pelayanan Publik: Teori Dan Praktik. *Penerbit Tahta Media*.
- Nomor, U. U. (24). Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Lembaran Negara Nomor*, 232.
- Siburian, R., Lukman, S., & Kurniawati, L. (2020). Analisis Penerapan Standar Operasional Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta. *JURNAL ILMIAH EKBANK*, 3(1).
- Darsono, Y. I. (2023). ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI ANGGOTA. *All Science Journals*, 2(1), 11-17.

Sipil Kabupaten Aceh Selatan (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Mampo, T. A. A., & Megawati, S. (2024). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LAYANAN PENYEDIAAN AKSES INFORMASI PUBLIK DI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. *Publika*, 160-171.

Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

TAMBUNAN, A. N. (2023). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Balige).

MOHAMMAD, R. (2023). *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)* (Doctoral dissertation, UIN KH ACHMAD SIDDIQ).

Sulfiani, A. N. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95-116.

Jamil, B., & Simamora, B. (2023). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

PRANATALIA, S. (2023). *IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SUMARORONG KABUPATEN MAMASA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Agus Dwiyanto, 2006. Mewujudkan good governance melalui pelayanan public. Yogyakarta 55281: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen Pelayanan Publik, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

UNDP. 2002. *Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World*. New York: Oxford University Press

Berlian, A. P. (2023). *Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan pencatatan sipil*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang No.30 Tahun 2014

Undang - Undang No. 25 tahun 2009

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang No.30 Tahun 2014

Undang - Undang No. 25 tahun 2009

LAMPIRAN

Surat izin Penelitian dari kampus

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024
Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 3787/UN4.8.1/PT.01.04/2024 14 Mei 2024
Lamp. :
Hal : **Permohonan Izin Melakukan Penelitian**

Yth. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Di
Tempat.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

Nama	: Selviani Arifin
Nomor Pokok	: E051201017
Departemen	: Ilmu Pemerintahan
Alamat	: Jl. Damai Tamalanrea, Makassar
Nomor HP	: 085 281 767 908

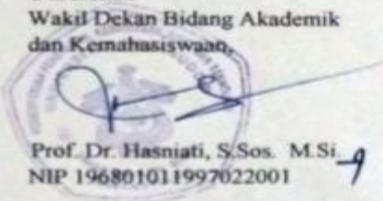
Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepustakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan Izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan


Prof. Dr. Hasniati, S.Sos. M.Si
NIP 196801011997022001

Tembusan
1. Dekan Fisip Unhas,
2. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas,
3. Kasubbag. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisip Unhas,
4. Bertinggal



Surat izin penelitian dari DPMPTSP Provins


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougerville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Web site : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **14070/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bone
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 2787/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SELVIANI ARIFIN**
Nomor Pokok : **E051201017**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km.10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI dengan judul :

**" GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Juni s/d 11 Agustus 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 31 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **197503212003121008**

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Surat Izin Meneliti dari kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,
Laman <https://dpmptsp.bone.go.id/>, pos-el dpmptspbhone@gmail.com

IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/12.637/VI/DP/DPMPTSP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : SELVIANI ARIFIN
NIP/Nim/Nomor Pokok : E051201017
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Tarasu Kec. Kajuara
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Hasanuddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 11 Juni 2024 s/d 11 Agustus 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 06 Juni 2024
KEPALA DINAS,

Drs. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dokumentasi Sarana prasarana Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.



Lokasi parkir motor



Tempat duduk antrian pelayanan.



Papan Alur pelaya



Tempat duduk antrian pengaduan.



Papan Alur pengaduan



Lokasi Parkiran mobil Dinas.



Parkiran mobil pegawai



Lapangan lokasi kantor.



Musholla



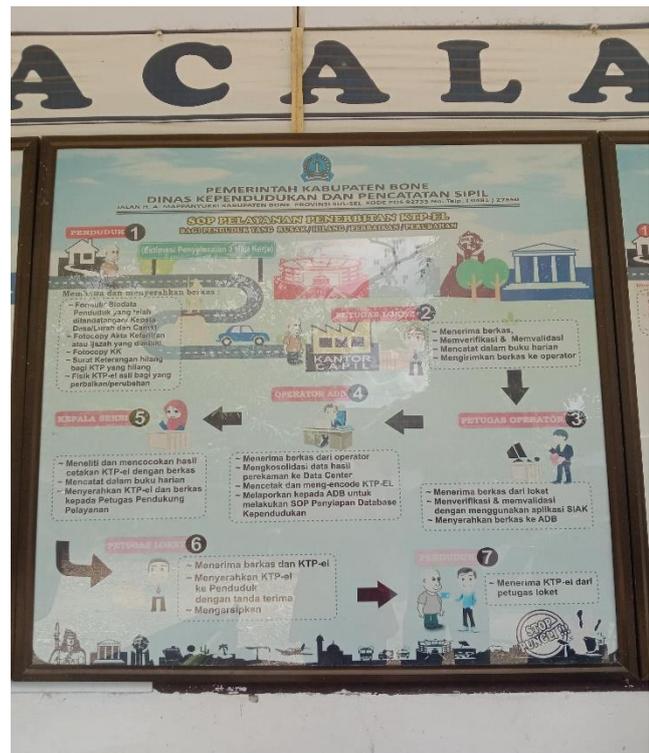
Struktur organisasi



papan SOP Pelayanan akta kelahiran



Papan SOP Pelayanan KTP-





Dokumentasi narasumber



Antrian pengambilan nomor pengaduan

kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bone





wawancara kepada kepala bidang ,

Staf pelayanan



narasumber pendukung dari masyarakat



